

Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Randhi Dwi Putra^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: randhidwi13@gmail.com

Tanggal Masuk:

7 November 2022

Tanggal Revisi:

10 April 2023

Tanggal Diterima:

27 Juni 2023

Keywords: *Accumulated Surpluses; Budget Calculation Excess, Financial Autonomy, Social Assistance Budget.*

Abstract

This research aimed to determine the examine the effect of financial autonomy, accumulated surpluses, budget calculation excess on social assistance budget. The population in this research are all Regency/City in Sumatera in 2017-2020. The sampling technique used the purposive sampling. Total sampel are 51 districts with 4 period years. The statistical method used panel data regression analysis. The result showed that financial autonomy, accumulated surpluses, budget calculation excess had a positive effect on social assistance budget.

How to cite (APA 6th style)

Putra, R. D., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 936-951.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.734>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi-strategi dengan pertimbangan pasar eksternal, lingkungan teknologi dan ekonomi. Salah satu faktor bentuk dari implementasi ide dan strategi tersebut adalah melalui proses penganggaran. Anthony & Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran berfungsi sebagai bentuk penegakkan tanggung jawab manajemen dan pelaksanaan akuntabilitas eksternal.

Pada organisasi sektor publik, anggaran erat kaitannya dengan akuntabilitas/pertanggung jawaban terhadap publik. Hyde (1992) menyatakan bahwa penganggaran pada sektor publik bersifat elektrik-multidimensional, artinya penganggaran sektor publik mencakup area mencakup sifat yang secara umum seperti mencatat hasil kebijakan, merangkum prioritas kebijakan, tujuan program serta sasarannya; dan

menggambarkan upaya layanan total pemerintah; pengukuran kinerja, dampak dan efektivitas keseluruhan. Membuktikan bukti bahwa anggaran sektor publik menjadi dasar kebutuhan bagi pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Anessi-Pessina et al., (2012) mengatakan perubahan anggaran dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan terutama pada perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Data tersebut diambil dari Kota Italia untuk menguji hipotesis tentang penyebab utama dari perubahan anggaran, menyebabkan perubahan anggaran sangat dipengaruhi oleh tingkat inkremental dalam proses penyusunan anggaran awal, serta oleh beberapa faktor internal seperti fiscal stress, varians anggaran dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran. Perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi keuangan dan politik (Agus Purwanto, 2016), budgeting and re-budgeting in local governments: Siamese twins? (Anessi-pessina et al., 2012).

Otonomi daerah merupakan hak atau kewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah sendiri. Pemerintah desa merupakan pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Variabel akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial menurut penelitian yang dilakukan oleh Bertha Abadiarti (2014) menemukan bahwa akumulasi surplus mempunyai pengaruh positif terhadap variabel perubahan anggaran belanja bantuan sosial, semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan daerah, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA merupakan surplus dari realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber pendapatan internal pemerintah daerah dan dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berjalan.

Hal serupa juga dilakukan oleh Purwanto A. pada 2016 yang meneliti tentang pengaruh kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Serupa dengan Annesi-Pessina *et al.*, (2012), perubahan anggaran yang difokuskan pada penelitian tersebut adalah perubahan anggaran belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan yang terdiri atas otonomi keuangan, akumulasi surplus, revisi surplus dan kondisi politik yang diwakili oleh fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu berpengaruh terhadap perubahan APBD Kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal: pertama, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian secara luas pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan data selama empat tahun dan termasuk dalam data *time series*. Ketiga, penelitian ini mencoba untuk memperoleh bukti empiris pengaruh otonomi daerah, akumulasi surplus, dan silpa terhadap *re-budgeting* pada pemerintah daerah.

Mengutip Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) bahwasanya, selama ini kendala yang sering terjadi dalam skema bantuan sosial ialah ketidaktepatan target penerima bantuan. Bantuan sosial sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung juga belum merangkul kelompok masyarakat yang sebelum adanya pandemi termasuk golongan masyarakat mampu, namun saat terjadi pandemi harus kehilangan penghasilan hingga kehilangan pekerjaannya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Banyak upaya pemerintah terkait pemberian jaminan serta pemenuhan *social justice* dan mewujudkan *economic justice* kepada warga negara Indonesia. Pemberian berbagai macam produk kebijakan berupa insentif seperti yang bersifat keringanan, pengurangan, penundaan, ataupun penghapusan beberapa kewajiban yang sebelumnya diwajibkan pada saat keadaan negara masih normal, sampai pada pemberian bantuan sosial baik itu berupa pemberian langsung maupun tidak langsung. Penulis menitik beratkan fokus teliti pada bagaimana negara menjalankan mitigasi risiko pada potensi penyalahgunaan bantuan sosial pada masa

pandemi COVID19. Dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka perlu dikaji faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan anggaran pada anggaran belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Riset perubahan anggaran belanja secara umum belum membuahkan hasil yang konsisten, khususnya perubahan anggaran belanja bantuan sosial masih sedikit dilakukan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan ini mengacu kepada jenis hubungan keagenan dimana prinsipal menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk keperluan mereka dengan mempercayakan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak agen. Prinsip utama teori tersebut menunjukkan bahwa ada dua pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (disebut agen). Teori agensi dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada saat ada ketidaklengkapan informasi saat melakukan perjanjian (Gudono, 2017). Lane (2003) menyatakan bahwa hubungan keagenan umumnya mendasari prinsip-prinsip pada Negara demokrasi modern, salah satunya hubungan keagenan identik dengan suatu keterkaitan di dalam sebuah kesepakatan yang dapat ditelusuri melalui proses penganggaran pada pemerintah (Moe, 1984)

Zimmerman (1977) menyatakan agency problem ada juga pada konteks organisasi pemerintahan. Principles disini yaitu rakyat, karena rakyat yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Teori keagenan mengandaikan bahwa hubungan prinsipal dan agen terdapat asimetri informasi (Gudono, 2017). Pemerintah daerah biasanya lebih mengetahui potensi dan kemampuan daerah mereka sendiri dalam memperoleh pendanaan melalui pungutan pajak dan retribusi daerah dari pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah biasanya sering mendapatkan dana perimbangan yang semakin besar, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD.

Anggaran Belanja Bansos

Perubahan anggaran termasuk upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan ini berimbas kepada peningkatan atau penurunan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri N0. 59 Tahun 2007 dan Pasal 1 angka 15 Nomor 32 Tahun 2011, menjelaskan belanja bantuan sosial yaitu bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau kelompok yang bersifat sosial berkemasyarakatan secara tidak terus menerus serta selektif dengan tujuan melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial.

Otonomi Keuangan

Otonomi keuangan yaitu semua hal yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah daerah disaat menyelenggarakan pemerintah daerah yang biasanya dinilai dengan uang dan bisa juga dengan segala sesuatu kekayaan yang bersangkutan dengan hak dan kekayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004: 379).

Akumulasi Surplus

Akumulasi surplus, Akumulasi surplus untuk satu tahun anggaran ialah penjumlahan dari SiLPA yang direalisasikan pada tahun sebelumnya serta SiLPA tahun berjalan dibagi dengan total penerimaan. Akumulasi surplus jadi pertimbangan untuk perubahan anggaran pendapatan serta belanja, sebab SiLPA tahun lalu ditetapkan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, serta SiLPA tahun berjalan masih belum pasti. SiLPA bisa jadi sumber pendapatan internal pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitas ataupun pengeluaran di tahun selanjutnya.

Dalam penetapan anggaran awal, akumulasi surplus pada tahun-tahun sebelumnya relatif besar, sehingga dibutuhkan penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial yang besar juga, dalam penentuan anggaran awal surplus yang terkumpul pada tahun-tahun sebelumnya relatif besar, sehingga dibutuhkan perubahan anggaran yang besar. Perihal yang sama berlaku, semakin besar otonomi fiskal dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD), semakin kecil perubahan anggaran, serta semakin besar revisi tahun sebelumnya, semakin kecil perubahan anggaran. Karakteristik yang ada merupakan anggaran disusun jauh sebelum laporan realisasi anggaran, karena itu, surplus anggaran tahun lalu muncul di pertengahan tahun ini. Timbulnya surplus ini akan menekan perubahan anggaran (Anessi- Pessina *et al.*, 2012).

SiLPA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup juga pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, lebih penerimaan dana perimbangan, lebih penerimaan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah, lebih penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban terhadap pihak ketiga sampai akhir tahun yang terselesaikan dan sisa dari dana kegiatan yang ditanggung dalam perubahan APBD (Abdullah & Rona, 2014).

Abdullah (2015) menyimpulkan bahwa saat perubahan pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada penyusunan APBD haruslah direvisi, karena jika besaran realisasinya surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan semenjak awal tahun penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan untuk mengkoreksi penerimaan SiLPA.

Pengaruh Otonomi Keuangan Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah seluruh hak serta kewajiban wilayah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan yang tercantum di dalamnya seluruh wujud kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah merupakan seluruh hal tentang hak serta kewajiban pemerintah daerah dalam aktivitas penyelenggara pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang termasuk didalamnya seluruh wujud kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004: 379)

Otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap anggaran belanja bantuan sosial yaitu semakin tinggi nilai otonomi keuangan maka akan semakin tinggi pula nilai anggaran belanja bantuan sosial, hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya perubahan otonomi keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annesi-Pessina *et. al* (2012) menemukan bahwa otonomi keuangan mempunyai pengaruh terhadap perubahan belanja, perihal ini menunjukkan kalau otonomi keuangan yang diukur bersumber pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi realisasi pendapatan total. Semakin tinggi tingkat otonomi keuangan maka semakin tinggi pula tingkat perubahan belanja yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto (2016) menemukan bahwa otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan belanja. Tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengakibatkan pendapatan asli daerah kurang signifikan dalam APBD. Otonomi daerah melalui pendapatan asli daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi target yang ada, semakin besar pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diangkat yaitu otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan belanja.

H1: Otonomi Keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pengaruh Akumulasi Surplus Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Akumulasi surplus untuk satu tahun anggaran ialah penjumlahan dari SiLPA yang direalisasikan pada tahun sebelumnya serta SiLPA tahun berjalan dibagi dengan total penerimaan. Akumulasi surplus itu sendiri jadi pertimbangan untuk perubahan anggaran pendapatan serta belanja, karena SiLPA tahun lalu ditetapkan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, serta SiLPA tahun ini masih belum pasti. SiLPA bisa jadi sumber pendapatan internal pemerintah daerah, yang bisa digunakan untuk mendanai aktivitas atau pengeluaran di tahun selanjutnya (Anessi-Pessina *et al*, 2012).

Akumulasi surplus mempunyai pengaruh positif terhadap anggaran belanja bantuan sosial, maksudnya yaitu semakin tinggi tingkat nilai akumulasi surplus, maka akan semakin tinggi pula nilai perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Abadiarti (2014) menemukan bahwa akumulasi surplus berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial, hal ini terjadi karena surplus yang terakumulasi pada tahun-tahun sebelumnya belum tentu lebih besar dalam penentuan penganggaran awal sehingga dibutuhkan perubahan anggaran.

H2: Akumulasi Surplus berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pengaruh SiLPA Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA berpengaruh positif terhadap anggaran belanja bantuan sosial, maksudnya yaitu semakin tinggi nilai SiLPA pada tahun sebelumnya maka akan semakin tinggi nilai anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan.

Penelitian yang dilakukan Mahameru Rosy dan Agung Nur Probohudono (2014) menemukan bahwa praktik belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Penelitian yang dilakukan Rafli dan Sari (2021) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial, karena semakin besar SiLPA suatu daerah, maka semakin besar pula perubahan anggaran belanja bantuan sosial sesuatu daerah.

H3: SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera yang berjumlah 161 kabupaten/kota dari tahun 2017-2020, bukan termasuk kabupaten/kota yang baru dimekarkan pada rentang tahun 2017-2020.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera pada tahun 2017-2020 dan bukan kabupaten/kota yang dimekarkan pada rentang tahun 2015-2020.	161
2.	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2017-2020 secara lengkap.	(59)
3.	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak memberikan informasi mengenai APBD secara rinci dan dipublikasikan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota atau dalam website Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.	(51)
Total Sampel		51
Tahun Penelitian		4
Periode pengamatan sampel dalam 4 tahun		204

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh individu-individu atau lembaga yang bukan peneliti secara langsung (Sekaran, 2003). Data-data ini didapatkan melalui akses internet, menelaah dokumen, dan publikasi informasi. Data pada penelitian ini juga bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan masing-masing provinsi yang ada di Sumatera dan terakhir website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJPK Kemenkeu RI).

Variabel dan Pengukuran

Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa bansos yaitu pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu perorangan, kepada keluarga, kelompok atau masyarakat yang bersifat tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu seperti pandemic covid-19 yang terjadi pada beberapa tahun belakangan.

Perubahan Anggaran Belanja Bansos= (Anggaran Belanja Bantuan Sosial Perubahan – Anggaran Belanja Bantuan Sosial Awal) / Anggaran Belanja Bantuan Sosial Awal

Otonomi Keuangan

Otonomi keuangan (OTK) adalah semua hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang termasuk hal yang berbentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kekayaan (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004: 379). Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan yang termasuk di dalamnya semua hak dan kewajiban daerah tersebut.

OTK = PAD tahun berjalan / realisasi pendapatan tahun berjalan.

Akumulasi Surplus

Akumulasi surplus (AKS) yang terdapat pada suatu tahun anggaran merupakan jumlah dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA) tahun lalu dan SiLPA tahun berjalan dibagi dengan pendapatan total. Akumulasi surplus biasanya menjadi suatu pertimbangan dalam sebuah perubahan anggaran pendapatan dan belanja hal ini dikarenakan SiLPA tahun sebelumnya ditetapkan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, selain itu SiLPA tahun berjalan jumlahnya masih belum bisa dipastikan. SiLPA bisa menjadi salah satu sumber pendapatan internal untuk pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan ataupun belanja tahun berikutnya.

AKS = SiLPA tahun berjalan + SiLPA tahun lalu / Realisasi pendapatan tahun berjalan

SiLPA

SiLPA merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran. Semakin besar tingkat SiLPA, maka membuktikan penganggaran yang kurang cermat (penganggaran yang buruk) atau pelaksanaan anggaran yang buruk. Oleh sebab itu, SiLPA menjadi salah satu sumber penerimaan yang didapatkan diawal tahun berjalan dikarenakan tidak terserapnya anggaran secara menyeluruh, akibat jumlah SiLPA pada tahun berjalan belum bisa diketahui maka jumlah SiLPA yang dianggarkan hanya bersifat sementara atau estimasi. Setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK, maka jumlah SiLPA yang sebenarnya baru dapat diketahui. Selisih atau varians antara SiLPA pada APBD dengan SiLPA dalam LRA pada laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pemerintah untuk dapat melakukan perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

SiLPA = (Target SiLPA APBD perubahan – Target SiLPA dalam APBD awal) / Target SiLPA dalam APBD awal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	1.587429	0.093091	0.116974	4.110371
Median	0.000000	0.073721	0.103143	0.337036
Maximum	38.65417	0.342194	0.348206	422.2952
Minimum	-1.000000	0.026750	0.003101	-0.956622
Std. Dev.	5.182685	0.062446	0.081795	30.79454

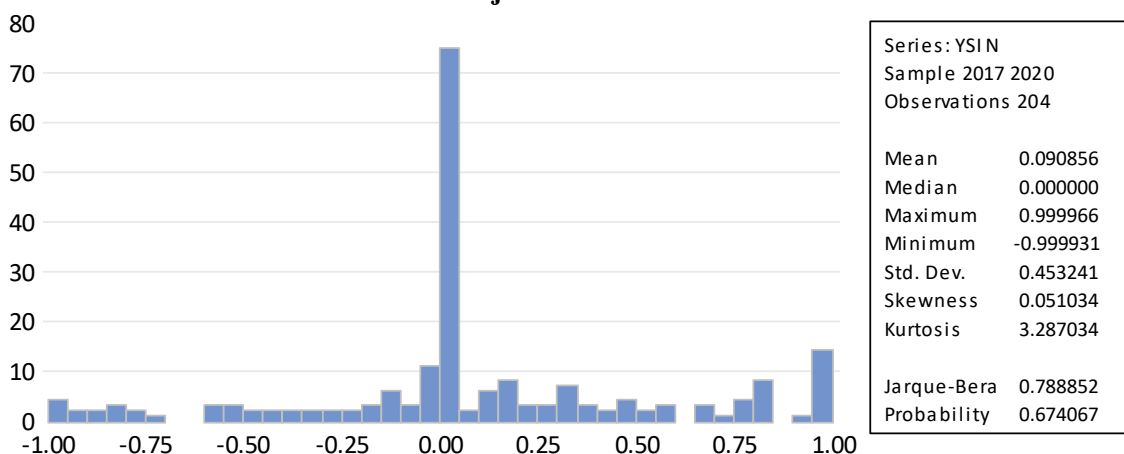
(Sumber: Data Olahan Eviews, 2022)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata dari variabel dependen atau perubahan belanja bantuan sosial adalah 1,5874. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera melakukan perubahan sebesar kurang lebih 150 persen atas anggaran belanja bantuan sosial. Hasil di atas juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah 38,65 atau lebih kurang 386 persen dari anggaran belanja bantuan sosial daerah awal tahun. Berdasarkan data sampel, pada tahun 2017 kabupaten Bengkulu Selatan melakukan perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial dari Rp 240.000.000 menjadi Rp9.517.000.000, atau dilakukan penambahan sebesar 386 persen. Kemudian, nilai minimum dari perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah -1,00 atau minus 1%. Perubahan ini dilakukan oleh kabupaten Karimun pada tahun 2017, dimana anggaran belanja bantuan sosial awal pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.142.095.880, kemudian dilakukan pengurangan menjadi Rp 219.000.000. Selain itu, standar deviasi dari variabel perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah sebesar 5,1826.

Variabel independen penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu Otonomi keuangan, Akumulasi surplus dan selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Variabel otonomi keuangan memiliki rata-rata sebesar 0,09, atau rata-rata kabupaten/kota di Sumatera melakukan otonomi keuangan sebesar 9% penambahan, dan dengan standar deviasi sebesar 0,06. Nilai maksimum dari otonomi keuangan adalah 0,34, sedangkan nilai minimumnya adalah 0,02. Variabel akumulasi surplus memiliki rata-rata sebesar 0,11, atau rata-rata kabupaten/kota di Sumatera melakukan perubahan anggaran akumulasi surplus sebesar 11% penambahan. Nilai maksimum dari akumulasi surplus adalah 0,34 sedangkan nilai minimumnya adalah 0,00. Variabel SiLPA memiliki rata-rata sebesar 4,11, atau rata-rata kondisi SiLPA yang dialami pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera adalah sebesar 411%. Nilai maksimum dari SiLPA adalah 422,29 sedangkan nilai minimumnya adalah -0,95.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas



Berdasarkan Tabel 3 Dilakukan uji asumsi klasik dan menghasilkan data yang memenuhi uji normalitas. Diketahui nilai dari statistik Jarque-Bera adalah 0,7888 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,67 memiliki nilai lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan situasi yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara variabel independent dalam sebuah model regresi berganda. Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel x berikut.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

	OtK	AkS	SiLPA
OtK	1.00000	0.15569	-0.07352
AkS	0.15569	1.00000	-0.09280
SiLPA	-0.07352	-0.09280	1.00000

(Sumber : Data Olahan Eviews,2022)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tiap variabel < dari 0,90 Oleh karena itu dari hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel x dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan variance residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Menguji ada tidaknya heteroskedasitas dalam penelitian inidapat dilakukan dengan uji White. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dari statistik uji White. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.168804	Prob. F(9,194)	0.9968
Obs*R-squared	1.585131	Prob. Chi-Square(9)	0.9965
Scaled explained SS	22.82774	Prob. Chi-Square(9)	0.0066

Berdasarkan output pada Tabel 5, hasil uji heteroskedestisitas menunjukkan hasil bahwa nilai prob menunjukkan 0,9968 karena $\geq 0,05$ maka asumsi heteroskesdastisitas tidak terjadi pada residual tisisas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi

antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan periode sebelumnya t -1 (sebelumnya). Jika terdapat masalah maka dapat disebut masalah autokorelasi, untuk mengetahui asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) maka dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin - Watson. Nilai statistik dari uji ini berkisar antara 0 dan 4. Apabila nilai dari hasil uji Durbin Watson lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

R-squared	0.818215	Mean dependent var	1.587429
Adjusted R-squared	0.815489	S.D. dependent var	5.182685
S.E. of regression	2.226211	Akaike info criterion	4.457893
Sum squared resid	991.2034	Schwarz criterion	4.522954
Log likelihood	-450.7050	Hannan-Quinn criter.	4.484211
F-statistic	300.0678	Durbin-Watson stat	1.734179
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 6 nilai dari statistik Durbin-Watson menunjukkan angka 1,734. Karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari satu, yakni $1 > 1,734 < 3$, dan juga memiliki nilai $dU < 1,734 < 4-dU$ maka model tidak mengalami gejala autokorelasi.

Model Regresi Panel

Analisis Regresi Linear Berganda berfungsi untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil Penelitian ini dapat menentukan pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial berdasarkan estimasi regresi panel dengan pendekatan Common Effect. Hasil estimasi regresi panel menggunakan Eviews 12 pada tabel berikut:

Tabel 7
Tabel Model Regresi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.880530	0.355267	-10.92286	0.0000
OTK	49.45197	2.792004	17.71200	0.0000
AKS	4.720613	1.932380	2.442901	0.0154
SILPA	0.075964	0.005646	13.45527	0.0000

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 OtK_{it} + \beta_2 AkS_{it} + \beta_3 SiLPA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Perubahan anggaran belanja bantuan sosial

OtK : Otonomi Keuangan

AkS : Akumulasi Surplus

SiLPA : Anggaran SiLPA

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

ε : Standar Error

t : *Time Series* (Waktu pengamatan)

i : *Cross Section* (Kabupaten/kota)

Dari hasil di atas diperoleh persamaan

$$Y = -3,880 + 49,451 X_1 + 4,720 X_2 + 0,075 X_3$$

Konstanta : -3,880

Koefisien X1 : 49,451

Koefisien X2: 4,720

Koefisien X3 : 0,075

Uji Signifikan

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan pada persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai Adjusted R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.818215	Mean dependent var	1.587429
Adjusted R-squared	0.815489	S.D. dependent var	5.182685
S.E. of regression	2.226211	Akaike info criterion	4.457893
Sum squared resid	991.2034	Schwarz criterion	4.522954
Log likelihood	-450.7050	Hannan-Quinn criter.	4.484211
F-statistic	300.0678	Durbin-Watson stat	1.734179
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber : Data Olahan Eviews, 2022)

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0.818 . Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independent mampu mempengaruhi Y secara serempak atau bersama-sama sebesar 81 %, dan sisanya sebesar 19 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama atau simultan akan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 maka dapat diketahui nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap terhadap Variabel dependent (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan output uji-t yang diambil dari pemilihan *Regresi Random commond*.

Tabel 9
Uji t Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.880530	0.355267	-10.92286	0.0000
OTK	49.45197	2.792004	17.71200	0.0000
AKS	4.720613	1.932380	2.442901	0.0154
SILPA	0.075964	0.005646	13.45527	0.0000

(Sumber : Data Olahan Eviews,2022)

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa signifikan X1 OTK pada tabel bernilai 0,0000 dan koefisien 49,451 dengan t-hitung sebesar 17,712. Artinya $0,0000 < 0,05$ serta $17,712 < 1,9719$. Hal ini menandakan OTK berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari OTK sesuai dengan arah hipotesis, hal mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari OTK terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “Otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” diterima.

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa signifikan X2 AKS pada tabel bernilai 0,0000 dan koefisien 4,720 dengan t-hitung sebesar 2,442. Artinya $0,0000 < 0,05$ serta $2,442 > 1,9719$. Hal ini menandakan akumulasi surplus berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari akumulasi surplus sesuai dengan arah hipotesis, dan mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari akumulasi surplus terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “Akumulasi surplus berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” diterima.

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa signifikan X3 SiLPA pada tabel bernilai 0,0000 dan koefisien 0,075 dengan t-hitung sebesar 13,455. Artinya $0,075 > 0,05$ serta $13,455 < 1,9719$. Hal ini menandakan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari SiLPA sesuai dengan arah hipotesis, dan mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” diterima.

Pembahasan

Pengaruh Otonomi Keuangan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2017-2020, ditemukan bahwa hipotesis (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi panel, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variable OTK yaitu Artinya $0,0000 < 0,05$ serta $17,712 < 1,9719$ dengan arah positif.

Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya tingkat otonomi keuangan pada pemerintah menjadi alasan perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan yang akan dilakukan. Hasil ini juga mengindikasikan perubahan yang terjadi pada anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh faktor otonomi keuangan. Otonomi keuangan ini sendiri tidak bisa dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah saat menetapkan hak dan kekayaan, atau karena perubahan asumsi. Otonomi daerah melalui

pendapatan asli daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi target yang ada. Semakin besar pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap perubahan belanja bantuan sosial.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agus Purwanto (2016) yang menemukan bahwa otonomi keuangan melalui pajak dan retribusi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penganggaran pada komponen otonomi keuangan itu sendiri dapat terukur dan mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pencapaian targetnya karena adanya self-interest masing-masing para stakeholder terkait, oleh karena itu otonomi keuangan dapat menjadi dasar untuk perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Menurutnya perubahan otonomi keuangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada jenis belanja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat otonomi keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya otonomi keuangan. Artinya disaat otonomi keuangan tinggi, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang terjadi pada pemerintah daerah.

Pengaruh Akumulasi Surplus terhadap Perubahan anggaran belanja bantuan sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2017-2020, ditemukan bahwa hipotesis (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akumulasi surplus berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi panel, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variable AKS yaitu Artinya $0,0000 < 0,05$ serta $2,442 > 1,9719$ dengan arah positif.

Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya tingkat akumulasi surplus pada pemerintah menjadi alasan perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan yang akan dilakukan. Hasil ini juga mengindikasikan perubahan yang terjadi pada anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi faktor akumulasi surplus. Artinya akumulasi surplus ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agus Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa tingkat akumulasi surplus berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan daerah maka semakin tinggi perubahan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat akumulasi surplus, hal ini menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi akumulasi surplus, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan anggaran belanja bantuan sosial

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera pada 2017-2020 ditemukan bahwa hipotesis (H3) diterima, hal ini menggambarkan bahwa tingkat perubahan pada SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Artinya semakin besar perubahan pada anggaran SiLPA, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang terjadi pada pemerintah. Hasil tersebut dapat

dilihat dari tabel regresi pada, yang menunjukkan nilai signifikan dan t-hitung yaitu $0,817 > 0,05$ serta $0,231 < 2.01063$ dengan arah positif.

Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya tingkat perubahan anggaran pada SiLPA menjadi alasan atas perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Abdullah & Rona (2014) menyatakan bahwa perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja lain pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Dan sebagian besar SiLPA disumbangkan ke pos belanja dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafli dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan publik, atau dengan kata lain SiLPA menjadi salah satu sumber pendanaan belanja bantuan sosial dalam rangka efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat perubahan SiLPA, menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi kenaikan perubahan anggaran SiLPA, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Isi Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus dan selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai model dalam melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesisi yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

Hipotesis pertama diterima, Otonomi Keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya perubahan otonomi keuangan. Artinya disaat perubahan otonomi keuangan tinggi, maka hal tersebut menjadi dasar pemerintah atas tingginya besar perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Otonomi keuangan daerah diukur dengan persentase PAD tahun berjalan / realisasi pendapatan tahun berjalan.

Hipotesis kedua diterima, Akumulasi surplus berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Jadi, semakin besar tingkat perubahan akumulasi surplus, menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi perubahan anggaran akumulasi surplus, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Akumulasi surplus diukur dengan persentase SiLPA tahun berjalan + SiLPA tahun lalu / Realisasi pendapatan tahun berjalan.

Hipotesis ketiga diterima, SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan anggaran SiLPA yang dialami suatu daerah, menjadi salah satu alasan atas perubahan

anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah mengalami perubahan anggaran SiLPA, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pembatasan pada komponen belanja, termasuk pada belanja bantuan sosial. Apabila tingkat perubahan anggaran SiLPA meningkat, maka akan menjadi dasar utama oleh pemerintah daerah dalam menentukan besarnya anggaran belanja bantuan sosial. Sehingga semakin tinggi tingkat perubahan anggaran SiLPA, maka hal tersebut menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah atas besar perubahan pada anggaran belanja bantuan sosial. SiLPA diukur dengan persentase (Target SiLPA APBD perubahan - Target SiLPA dalam APBD awal) / Target SiLPA dalam APBD awal.

Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan pengukuran yang relatif sederhana, yakni presentase selisih angka dalam APBD setelah perubahan dengan APBD awal. Padahal di dalam angka-angka tersebut tersirat hal-hal yang bersifat tersembunyi, seperti titipan dari politisi dan “*mark up*” untuk mendanai pembayaran yang secara normatif tidak boleh dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel dan data lain dalam penelitian, menambah jumlah observasi penelitian, dan mengubah model regresi lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada penelitian sebelumnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan menguji faktor eksternal lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, seperti kondisi keuangan pemerintah, ukuran pemerintah daerah, dan lainnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memodifikasi model, seperti dengan menambah variabel pemoderasi dan variabel kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiarti. (2014). Pengaruh Tingkat Inkremental Penganggaran Awal, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sosioekonomi Lokal Terhadap Rebudgeting Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Informasi Website Pemerintah Daerah). Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Abdullah, S., & Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. 6(2), 272–283.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014a). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Journal of Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Afrah, J., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator. 4(1), 162–173.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese twins? *Public Administration Review*, 72(6), 875–884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>
- Anthony, R., & Govindarajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Bratakusumah, Dedy Supriyadi, dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (4 (ed.))*. Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Edisi 4. Andi, Yogyakarta.
- Hyde, A.C. (1992). *Government Budgeting : Theory, Process, and Politics*.

- Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>.
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). PENGARUH FISCAL STRESS DAN LEGISLATURE SIZE TERHADAP EXPENDITURE CHANGE PADA KABUPATEN / KOTA. *XX(03)*, 477– 478.
- Lu, H dan R. L. Facer. (2004). Budget Change in Georgia Counties: Examining Patterns and Practise. *American Review of Public Administration*, 34(1), 67-93.
- Purwanto, A. (2016a). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(2), 87–96.
- Purwanto, A. (2016b). PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN POLITIK TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87–96.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Method for Business A Skill – Building Approach*, 4th Edition. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.